

GERONTOKRASI DAN REALISME HIBRIDA: KEMUNDURAN DIPLOMASI LINGKUNGAN MENUJU KONFLIK HEGEMONIK

Denada Gabriella

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Januari 2026

Available online Januari 2026

Email:

nada.briellachr@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Indonesia Penelitian ini menganalisis fenomena kemunduran (retrogression) dalam hubungan internasional kontemporer, di mana fokus global yang seharusnya berada pada fase diplomasi lingkungan justru berbalik arah menuju realisme ofensif dan konflik terbuka pada periode 2025-2026. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mengapa krisis kepemimpinan global yang ditandai oleh gerontokrasi mampu membelokkan arah fokus arena HI dari keberlanjutan menuju konflik hegemonik. Melalui metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada intervensi Amerika Serikat di Venezuela, konflik Thailand-Kamboja, dan proteksionisme hijau Uni Eropa (EUDR), penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan global yang menua dan transaksional cenderung mengabaikan norma kedaulatan Westphalia. Temuan utama menunjukkan bahwa kedaulatan negara kini bersifat kondisional. Status "negara berdaulat" dapat dibatalkan seketika oleh hegemon jika negara tersebut dilabeli sebagai "kriminal", sebagaimana terlihat dalam penangkapan Presiden Venezuela oleh AS dan ancaman aneksasi wilayah lainnya. Hal ini menciptakan ketidakstabilan sistemik yang meruntuhkan pasar energi global dan meminggirkan isu keadilan iklim.

Kata Kunci: Kemunduran Hubungan Internasional; Gerontokrasi; Kedaulatan Kondisional; Realisme Hibrida; Krisis Venezuela

Abstract

This study analyzes the phenomenon of retrogression in contemporary international relations, where the global focus, which ideally should be in the phase of environmental diplomacy, has instead reversed course toward offensive realism and open conflict during the 2025-2026 period. This research aims to answer the question of why a global leadership crisis characterized by gerontocracy is capable of diverting the focus of the IR arena from sustainability toward hegemonic conflict. Through a descriptive qualitative method with case studies on United States intervention in Venezuela, the Thailand-Cambodia conflict, and European Union green protectionism (EUDR), this study finds that aging and transactional global leadership tends to disregard Westphalian sovereignty norms. The main findings indicate that state sovereignty is now conditional; the status of a "sovereign state" can be instantly revoked by a hegemon if the state is labeled as "criminal," as seen in the US capture of the Venezuelan President and threats of annexation of other territories. This creates systemic instability that collapses global energy markets and marginalizes issues of climate justice.

Keywords: International Relations Retrogression; Gerontocracy; Conditional Sovereignty; Hybrid Realism; Venezuela Crisis

Pendahuluan

Evolusi studi dan praktik Hubungan Internasional (HI) pasca-Perang Dunia II menjanjikan sebuah narasi kemajuan (progress narrative). Teori-teori besar HI memetakan perjalanan peradaban dari ketakutan akan kelangsungan hidup negara dalam sistem anarki, menuju kemakmuran bersama melalui perdagangan bebas dan institusi internasional, dan akhirnya bermuara pada kesadaran kolektif akan nasib bumi. Pada dekade 2010-an, dengan diadopsinya *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Perjanjian Paris, dunia tampak siap meninggalkan politik kekuasaan mentah demi kolaborasi antargenerasi untuk menyelamatkan planet ini (Gomez-Echeverri, 2018).

Namun, realitas geopolitik tahun 2026 menyajikan sebuah anomali yang mengerikan. Fokus global yang seharusnya bergerak dari pertahanan menuju lingkungan kini mundur kembali

ke konflik fisik dan perebutan teritorial. Alih-alih mendiskusikan target emisi *Net Zero* atau transfer teknologi hijau, halaman depan media internasional didominasi oleh berita aneksasi wilayah, pengambilalihan ladang minyak secara paksa, dan revitalisasi konflik perbatasan yang terkubur sejarah. Panggung diplomasi global, yang seharusnya menjadi arena deliberasi rasional, telah berubah menjadi gelanggang pertarungan ego para strongmen yang menua.

Eskalasi peristiwa geopolitik pada awal Januari 2026 menjadi titik balik yang menegaskan kemunduran ini. Operasi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan pengambilalihan kendali de facto negara tersebut oleh Washington menandai runtuhnya prinsip non-intervensi yang menjadi pilar PBB. Sementara itu, di Asia Tenggara, konflik perbatasan Thailand-Kamboja meletus akibat nasionalisme sumber daya yang gagal diredam oleh mekanisme regional ASEAN. Penelitian ini berargumen bahwa stagnasi kepemimpinan global dan ketiadaan visi jangka panjang memfasilitasi kembalinya "hukum rimba", di mana perlindungan hukum internasional menjadi tidak relevan di hadapan kekuatan militer.

Krisis ini diperparah oleh "krisis regenerasi", ketiadaan pemimpin dari generasi milenial atau Gen-Z yang memiliki kapasitas politik cukup kuat untuk menantang hegemoni generasi sebelumnya (Peyser, 2021). Absennya perspektif jangka panjang menciptakan apa yang disebut sebagai "Jebakan Miopia Gerontokratis". Pemimpin tua cenderung memprioritaskan akumulasi *hard power* dan aset fosil yang nyata, mengabaikan ancaman abstrak seperti perubahan iklim atau hukum internasional yang dianggap lemah.

Melalui analisis mendalam, riset ini bertujuan menjawab pertanyaan "Mengapa krisis kepemimpinan dan gerontokrasi mampu membelokkan arah fokus arena HI dari isu lingkungan kembali ke ranah realis?".

Tinjauan Pustaka

Untuk memahami fenomena di mana hukum internasional tampak tidak berdaya melindungi kedaulatan negara kecil dari agresi negara besar, penting untuk meninjau kembali konsep kedaulatan itu sendiri. Literatur Hubungan Internasional konvensional sering menganggap kedaulatan sebagai hak absolut. Namun, Gerry Simpson dalam bukunya "*Great Powers and Outlaw States*" yang dipublikasikan pada tahun 2004 menawarkan kerangka analisis "kedaulatan yang tidak setara" (*unequal sovereigns*). Simpson berargumen bahwa tatanan internasional selalu memuat *legalized hierarchy* di mana negara dengan kekuatan besar memiliki prerogatif untuk melabeli negara-negara tertentu sebagai *outlaw states* atau musuh kemanusiaan, yang kemudian membenarkan pencabutan hak kedaulatan mereka.

Pandangan ini diperkuat oleh Stephen D. Krasner dalam "*Sovereignty: Organized Hypocrisy*" yang dipublikasikan pada tahun 1999. Dalam tulisannya, ia menyatakan bahwa kedaulatan Westphalia—prinsip bahwa negara memiliki otoritas eksklusif di wilayahnya—sejak lama hanyalah sebuah "kemunafikan terorganisir". Krasner menegaskan bahwa aturan kedaulatan akan selalu dilanggar oleh negara-negara kuat ketika kalkulasi kepentingan dianggap lebih menguntungkan daripada mematuhi norma internasional. Dalam konteks kepemimpinan, studi mengenai Gerontokrasi menunjukkan bahwa pemimpin yang menua sering kali memiliki fleksibilitas kognitif yang lebih rendah dan kecenderungan untuk mengambil risiko konflik yang lebih tinggi demi mengamankan *legacy* politik mereka, yang menjelaskan mengapa diplomasi saat ini cenderung konfrontatif alih-alih kolaboratif.

Lebih lanjut, studi oleh Bertoli, A., Dafoe, A., & Trager, R pada tahun 2024 lewat publikasi "*Leader age and international conflict: A regression discontinuity analysis*" menunjukkan bahwa kecenderungan perbedaan sisa harapan hidup dengan masa jabatan menjadi kesenjangan berpikir dalam pengambilan keputusan. Hal ini mengakibatkan para pemimpin berusia lanjut kurang terinsentif untuk berinvestasi pada solusi jangka panjang yang

manfaatnya baru akan terasa puluhan tahun kemudian. Sebaliknya, mereka terdorong untuk mengejar *legacy* instan atau kemenangan jangka pendek yang dapat mereka saksikan sendiri. Ini menjelaskan mengapa di tahun 2026, fokus beralih kembali ke penguasaan aset fisik yang memberikan kepuasan strategis instan (Georgetown Security Studies Review).

Pemimpin gerontokrat cenderung memproses informasi baru melalui *mental map* yang terbentuk di masa formatif mereka (Eric, 2021). Bagi Trump, Putin, dan banyak elit global saat ini, masa formatif tersebut adalah era Perang Dingin dan krisis minyak 1970-an. Akibatnya, ketika menghadapi krisis modern yang kompleks, mereka cenderung mundur (*regress*) ke solusi yang mereka kenal, seperti aneksasi, ancaman militer, dan proteksionisme, alih-alih solusi inovatif abad ke-21.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus ganda. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk mengurai kompleksitas fenomena kontemporer dan memahami makna di balik tindakan aktor-aktor negara dalam konteks spesifik tahun 2026. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap sumber-sumber sekunder yang mencakup laporan institusi, dokumen kebijakan, artikel jurnal ilmiah, dan pemberitaan kredibel terkini periode 2024 hingga awal 2026. Teknik analisis data menggunakan *process tracing* untuk melacak bagaimana keputusan pemimpin negara secara langsung memicu eskalasi konflik dan bagaimana retorika "negara kriminal" digunakan untuk melegitimasi pelanggaran kedaulatan.

Analisis

a. Runtuhnya Tatanan Liberal: Doktrin Don-roe dan "Perampokan" Minyak Venezuela

Pada awal Januari 2026, dunia menyaksikan runtuhnya fasad tatanan internasional berbasis aturan (*Rules-Based International Order*) melalui intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela. Operasi ini, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya Cilia Flores, serta penyerahan kekuasaan secara de facto kepada Wakil Presiden Delcy Rodriguez di bawah tekanan AS, menandai kembalinya imperialisme telanjang (CNN, 2026; Holland & Knight, 2026).

Dalam paradigma Liberal, intervensi asing pasca-Perang Dingin biasanya dibungkus dengan justifikasi kemanusiaan atau promosi demokrasi. Namun, narasi yang dibangun oleh Presiden Trump dan Menlu Marco Rubio sangat transaksional dan mencerminkan Realisme Ofensif. Tidak ada pretensi untuk membangun institusi demokrasi jangka panjang.

Trump secara terbuka menyatakan di platform Truth Social bahwa Delcy Rodriguez akan menyerahkan antara 30 hingga 50 juta barel minyak berkualitas tinggi dan bahwa uang hasil penjualannya akan dikontrol oleh pihak Amerika Serikat (The Hindu, 2026). Menlu Marco Rubio menegaskan strategi "stabilisasi, pemulihan, dan transisi" serta adanya *leverage* oleh AS, yang pada dasarnya adalah eufemisme untuk kontrol ekonomi penuh melalui karantina minyak (Hindustan Times, 2026). Ini adalah regresi dari norma kedaulatan Westphalia dan prinsip non-intervensi, kembali ke era merkantilisme di mana negara kuat berhak menyita sumber daya negara lemah sebagai upeti.

Obsesi pemimpin gerontokrat AS terhadap minyak Venezuela mencerminkan bias kognitif generasi mereka. Bagi Trump dan Rubio, keamanan nasional masih didefinisikan oleh barel minyak, bukan oleh kapasitas baterai atau kredit karbon. *Mental map* mereka terkunci pada era krisis energi 1970-an. Mereka tidak memiliki insentif biologis untuk peduli pada dampak iklim jangka panjang dari pembakaran 50 juta barel minyak tersebut, fokus mereka adalah menurunkan harga bensin domestik untuk kepuasan pemilih jangka pendek. Ini adalah contoh

klasik bagaimana gerontokrasi menghambat transisi energi global.

Langkah agresif AS ini memberikan pukulan telak bagi teori perdamaian liberal yang bertumpu pada interdependensi ekonomi. Saham-saham minyak China jatuh drastis karena Beijing telah menginvestasikan miliaran dolar dalam skema *oil-for-loans* dengan Venezuela, yang selama ini dianggap sebagai "polis asuransi" energi China yang bebas dari kontrol AS (Investing, 2026; Time, 2026). Dalam logika liberal, ketergantungan ekonomi timbal balik antara AS dan China seharusnya mencegah tindakan yang begitu merugikan salah satu pihak. Namun, realitas 2026 menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan yang agresif, pertimbangan geopolitik mengalahkan stabilitas pasar saham. Kehilangan aset strategis ini memaksa China untuk mengevaluasi ulang kerentanan energinya, yang berpotensi memicu balasan asimetris di kawasan lain (seperti Laut China Selatan), memperluas siklus konflik.

b. Rusia dan Perangkap Security Dilemma: Paranoid di Usia Senja

Di kawasan Eropa, konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2026 tidak menunjukkan tanda-tanda de-eskalasi, melainkan semakin memanas akibat insiden dugaan serangan drone terhadap kediaman Vladimir Putin di Valdai (Al Jazeera, 2025). Meskipun CIA dan intelijen Barat membantah keterlibatan Ukraina respons Kremlin sangat keras. Bagi pemimpin otoriter yang menua seperti Putin, serangan terhadap simbol keamanan pribadi dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial yang jauh lebih besar daripada kekalahan taktis di medan perang. Literatur gerontokrasi menunjukkan bahwa pemimpin tua otoriter seringkali mengidentifikasi diri mereka secara total dengan negara "*L'État, c'est moi*". "Luka" pada kediaman Putin diterjemahkan sebagai serangan terhadap jantung Rusia. Akibatnya, rasionalitas strategis dikesampingkan demi pembalasan emosional.

Data lapangan menunjukkan bahwa pada tahun 2025, Rusia berhasil merebut lebih dari 5.600 km persegi wilayah Ukraina, capaian terbesar sejak awal perang, namun dengan biaya manusia yang sangat tinggi (The Guardian). Logika yang digunakan Putin bukan lagi kalkulasi untung-rugi, melainkan *sunk cost fallacy* dan pertarungan *legacy*.

c. Mengapa Krisis Regenerasi Mematikan Masa Depan?

Pemimpin gerontokrat seperti Trump dan Putin hidup dalam gelembung kognitif masa lalu. Mereka tidak memiliki kepentingan biologis di masa depan jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu eksistensial seperti perubahan iklim, yang menuntut pengorbanan saat ini demi keselamatan masa depan, tidak masuk dalam kalkulasi rasional mereka. Ketidadaan pemimpin milenial yang mumpuni di pucuk pimpinan strategis berarti suara masa depan dibungkam secara struktural.

Generasi muda, cenderung lebih mendukung kerja sama internasional dan solusi iklim (The Chicago Council on the Global Affairs, 2024). Namun, sistem politik di banyak negara besar telah memblokir mobilitas vertikal mereka, menciptakan gerontokrasi yang terisolasi dari realitas baru. Akibatnya, respons terhadap krisis 2026 adalah respons kuno yang termanifestasi dalam bentuk perang, aneksasi, dan tembok perbatasan.

Kesimpulan

Tahun 2026 menjadi saksi bisu kemunduran besar dalam hubungan internasional. Harapan bahwa dunia akan berevolusi menjadi komunitas global yang sadar lingkungan dan saling terhubung secara ekonomi telah dihancurkan oleh kebangkitan kembali Realisme yang agresif dan transaksional. Riset ini menyimpulkan bahwa fenomena ini adalah hasil langsung dari krisis kepemimpinan gerontokratis.

Para pemimpin tua yang memegang kendali atas kebijakan global terjebak dalam paradigma keamanan usang. Ketidakmampuan mereka untuk melihat dunia sebagai satu kesatuan ekologis, ditambah dengan ketakutan akan kehilangan relevansi kekuasaan, mendorong mereka untuk memilih konflik fisik dan penguasaan sumber daya fosil. Kasus aneksasi Venezuela, eskalasi perang Ukraina, dan konflik perbatasan di Asia Tenggara adalah manifestasi dari upaya putus asa untuk mempertahankan *status quo* kekuasaan melalui cara-cara koersif.

Daftar Pustaka

Buku:

- Krasner, S. D. (1999). *Sovereignty: organized hypocrisy*. Princeton university press.
- Simpson, G. (2004). *Great powers and outlaw states: unequal sovereigns in the international legal order* (Vol. 32). Cambridge University Press.

Artikel Ilmiah:

- Bertoli, A., Dafoe, A., & Trager, R. (2024). Leader age and international conflict: A regression discontinuity analysis. *Journal of peace research*, 61(4), 643-658.
- Eric, S. (2021). The aging leader: Approaching age as a factor in international relations. *Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения*, 14(4), 446-455.
- Gomez-Echeverri, L. (2018). Climate and development: enhancing impact through stronger linkages in the implementation of the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals (SDGs). *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 376(2119), 20160444.

Website:

- Al Jazeera. (2026). Have Russian claims of Ukraine attack on Putin home ended hopes for peace?. Diakses melalui <https://www.aljazeera.com/news/2025/12/30/have-russian-claims-of-ukraine-attack-on-putin-home-ended-hopes-for-peace>
- CNN. (2026). January 3, 2026 – Maduro in US custody. Diakses melalui <https://edition.cnn.com/world/live-news/venezuela-explosions-caracas-intl-hnk-01-03-26>
- Cunningham, A. A Modern Day Sparta: The American Gerontocracy and the National Security Implications of Elderly Rule. *Georgetown Security Studies Review*. Diakses melalui <https://gssr.georgetown.edu/the-forum/regions/americas/a-modern-day-sparta-the-american-gerontocracy-and-the-national-security-implications-of-elderly-rule/>
- Hindustan Times. (2026). Stabilisation, recovery and transition: After oil deal, Marco Rubio details US' plan for Venezuela. <https://www.hindustantimes.com/world-news/stabilisation-recovery-transition-after-oil-deal-marco-rubio-details-us-plan-for-venezuela-101767840472068.html>
- Holland & Knight. (2026). Venezuela: Navigating a New Era of Uncertainty. Diakses melalui <https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2026/01/venezuela-navigating-a-new-era-of-uncertainty>.
- Investing. (2026). China oil stocks drop as U.S. ousts Venezuela's Maduro. Diakses melalui <https://www.investing.com/news/stock-market-news/china-oil-stocks-drop-as-us-ousts-venezuelas-maduro-93CH-4428970>

- Peyser, E. (2021). "Gerontocracy Is Hurting Democracy." New York Magazine. Diakses melalui <https://nymag.com/intelligencer/2021/03/gerontocracy-is-hurting-american-democracy.html>
- The Chicago Council on the Global Affair. (2024). Generational Divides in Attitudes toward the US Role in the World. Diakses melalui <https://globalaffairs.org/research/public-opinion-survey/generational-divides-attitudes-toward-us-role-world>
- The Guardian. Ukraine war briefing: Russia makes biggest battleground gains since first year of war, analysis shows. Diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2026/jan/03/ukraine-war-briefing-russia-makes-biggest-battleground-gains-since-first-year-of-war-analysis-shows>
- The Hindu. (2026). New Venezuela leader says 'no foreign power' running country. Diakses melalui <https://www.thehindu.com/news/international/new-venezuela-leader-says-no-foreign-power-running-country/article70480706.ece>
- Time. (2026). How Trump's Venezuela Takeover Could Change the World. Diakses melalui <https://time.com/7343019/venezuela-trump-oil-china/>